

Menkumham Telisik Unsur Pidana Sipir yang Doyan Pamer Harta

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tengah menelisik unsur pidana pada pemeriksaan sipir Rajabasa Dhawank Delvi, yang viral di media sosial karena sering memamerkan harta kekayaannya (*flexing*).

“Semua sedang dicek. Irjen sudah jalan, dirjen sudah periksa, nanti kita lihat kalau ada unsur pidana kita ini (usut),” kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4).

Yasonna menjelaskan beberapa informasi awal terkait harta milik Dhawank telah diberitahukan kepadanya.

“Sipir sudah kita tindak, kita tarik dan sudah ada pemeriksaan memang kolomnya (kolam renang) itu 2,5 x 4 katanya, ini katanya ya. Motor itu motor pinjaman sedang dicek semua. Dan dia sekarang ditarik dan diperiksa termasuk alasan dia memang ada klinik istrinya, klinik istrinya itu seberapa besar, semua sedang di cek,” kata Yasonna.

Yasonna memastikan bahwa Dhawank sudah tidak menjabat lagi sebagai sipir. Ia telah ditarik ke Kantor

Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung untuk menjalani pemeriksaan.

“Sudah ditarik ke atas, sudah ditarik ke kanwil, tidak lagi menjabat di situ,” kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Lampung memastikan telah memeriksa Dhawank Delvi. Dhawank Delvi merupakan sipir atau petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa yang viral karena kerap memamerkan harta kekayaannya (*flexing*).

“Sudah kita tarik ke Kanwil Kemenkumham Lampung untuk menjalani pemeriksaan,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing melalui keterangan resminya, Rabu (26/4/2023).

Sorta Delima menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pembinaan terhadap Dhawank Delvi setelah ramai pemberitaan di media. Namun, Sorta mengakui, pihaknya hingga kini belum memutuskan hukuman untuk sipir tersebut. ● mei

Kasus Suap Bupati Meranti, 4 Orang Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang berpegangan ke luar negeri. Pencegahan ini terkait dengan kasus suap Bupati Kepulauan Meranti, M Adil (MA).

Keempatnya dicegah berpegangan ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 27 April 2023.

“KPK mencegah empat orang agar tidak berpegangan keluar negeri dan telah diajukan ke Dirjen Imigrasi sejak 27 April 2023 untuk waktu enam bulan ke depan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Jumat (28/4).

Adapun, keempat orang yang dicegah ke luar negeri tersebut yakni, tiga bos PT Hamsa Mandiri International, Reza Pahlevi, Maria Giptia, dan Deny Surya AR, serta satu Aparatur Sipil Negara (ASN), Heny Fitriani. “Ya empat orang tersebut tiga swasta dan satu ASN,” ungkap Ali.

Keempat orang tersebut dicegah karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk percepatan kelengkapan alat bukti kasus dugaan suap Bupati Kepulauan Meranti. KPK mengimbau agar para pihak yang dicegah tersebut kooperatif jika dipanggil sebagai saksi.

“Kami berharap agar pihak dimaksud nantinya kooperatif hadir dalam setiap agenda pemanggil-

an tim penyidik KPK,” katanya.

Bupati Kepulauan Meranti, M Adil (MA) ditetapkan tersangka bersama dengan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitri Ningsih (FN) serta Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa (MFA).

Adil dijerat dengan tiga kasus sekaligus. Pertama, Adil diduga telah melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan kisaran 5 persen sampai 10 persen untuk setiap SKPD.

Kasus kedua, yakni terkait dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Adil diduga menerima fee Rp1,4 miliar dari perusahaan travel umrah, PT Tanur Muthmainnah melalui Fitri Ningsih. Fitri Ningsih juga merupakan Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah.

Ketiga, berkaitan kasus dugaan suap pengondisian pemukiman keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. Adil diduga telah menyuap M Fahmi Aressa senilai Rp1,1 miliar agar Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan status predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ● han

Empat Pencuri Laptop Milik Pemudik di Rest Area Tol Cikampek Ditangkap

JAKARTA (IM) - Jajaran Satlantas Polda Jawa Barat (Jabar) menangkap empat pria tersangka pencuri laptop di Rest Area Tol Jakarta-Cikampek.

Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Wibowo mengungkapkan, petugas Satlantas menerima laporan pencurian dari korban yang merupakan pemudik di Tol Jakarta-Cikampek KM 57.

Dengan respons cepat menerima laporan tersebut, kata Wibowo, pihaknya langsung mengejar dan menangkap empat pelaku di Rest Area KM 147 A Tol Padaleunyi.

“Telah diamankan empat orang diduga pelaku pencurian pemberatan, di Rest Area 147,” kata Wibowo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (28/4).

Keempat tersangka adalah berinisial MEM, AR, JH, dan YP.

Petugas Satlantas awalnya menerima laporan pencurian dari korban, sekitar

pukul 02.30 WIB, Jumat (28/4). Setelah menerima laporan itu, polisi langsung mencari pelaku dengan melacak GPS dari laptop milik korban.

“Hasil penelusuran GPS laptop pelaku singgah di Rest area 147. Kemudian anggota PJR melaporkan kejadian tersebut ke Kanit 1 PJR, kemudian Kanit PJR memerintahkan panit dan anggota meluncur ke KM 147 Tol Padaleunyi untuk melakukan pemantauan, penangkapan dan pengeledahan bersama korban,” ujar Wibowo. Sebelum 31 May 2023

Setelah melakukan pemeriksaan, kata Wibowo, petugas menemukan barang bukti berupa Laptop yang dicuri para pelaku. Saat ini, pelaku telah diserahkan ke jajaran Ditreskrim Polda Jabar.

“Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di serahkan ke piket Dit Reskrim Polda Jabar,” ucap Wibowo. ● lus

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PERTEMUAN PRABOWO SUBIANTO DENGAN MUHAIMIN ISKANDAR

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan (tengah) menyapa wartawan di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/4). Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta jajaran menerima kunjungan silaturahmi Idul Fitri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta jajaran.

Penjelasan Lengkap Panglima TNI Terkait “Siaga Tempur” KKB Papua

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, situasi di wilayah di Papua saat ini cukup aman.

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan soal ‘siaga tempur’ terkait dengan keberadaan KKB Papua. Ia menegaskan bahwa siaga tempur bukan operasi tempur.

“Bukanlah operasi tempur, namun siaga jika sewaktu-waktu diserang sudah siap. Secara umum, situasi di Papua aman,” ujar Yudo dalam keterangannya, Jumat (28/4).

Yudo mengatakan bahwa situasi di beberapa wilayah di Papua saat ini cukup aman, seperti di Sorong, Manokwari, dan Merauke.

“Cukup petugas Koramil, Kodim, Lanal, Lanud, personel organik saja yang berinteraksi dengan masyarakat umum secara damai,” tuturnya.

Panglima mengatakan, siaga tempur hanya diterapkan di Nduga lantaran daerah tersebut rawan. Namun, persiapan tersebut bukan operasi tempur.

Yudo mengatakan, semua kegiatan TNI merupakan bentuk operasi, seperti Operasi Teritorial, dan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pam Rawan). Kemudian, Operasi Pengamanan Perbatasan (Ops Pamatas) dan Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki).

“Operasi penegakan hukum Damai Cartenz dan pendekatan tetap dilaksanakan,” ujar Yudo.

Sebelumnya di Istana Wakil Presiden, Panglima TNI Laksamana Yudo Mar-

gono menegaskan status siaga tempur bagi prajurit TNI di tanah Papua bukanlah pelaksanaan operasi militer.

“Kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, karena masyarakatnya di situ kerawanan-nya tidak tinggi, tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur,” kata Yudo, Rabu (26/4).

Yudo mengumumkan siaga tempur pada 18 April 2023 di daerah-daerah di Papua yang dinilai rawan teror dan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris.

“Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelaseatkan itu operasi militer, bukan belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit,” katanya.

Ia mengatakan siaga tem-

pur perlu untuk memperkuat naluri bertempur para prajurit apalagi jika mereka diserang oleh KKB.

“Itu kan bukan operasi militer, siaga tempur, siaga tempur itu kan untuk pasukan kita sendiri supaya siaga sewaktu-waktu diserang. TNI ini kan harus selalu siaga pasukan itu,” tambah Yudo.

Dengan status siaga tempur, dia melanjutkan, bukan berarti prajurit TNI akan bertindak ofensif.

“Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanan-nya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi,” tutur Yudo. 31 May 2023

Dia menjelaskan, penempatan status siaga tempur itu dilakukan pasca gugurnya lima prajurit dari Yonif 321/GT akibat penyerangan yang dilakukan oleh KKB atau kelompok separatis teroris (KST) pada pertengahan April 2023 di Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

“Kelima prajurit gugur

dalam operasi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air, Phillip Mehtrens, yang disandera KKB sejak Februari 2023. Mereka adalah Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, Prada Sukra dan Pratu F.

Para prajurit yang gugur itu tergabung dalam 36 prajurit Satuan Tugas (Satgas) Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang bertugas menyisir wilayah Mugi-man, Nduga, Papua, pada 15 April 2023.

Namun, saat mereka menjalani tugasnya, KKB atau KST menghadang dan menyerang pasukan TNI itu. “Prajurit yang masih di sana tetap ‘stand by’, tetap melaksanakan operasi,” ucap dia.

Panglima TNI juga memastikan para prajurit dari dari Yonif 321/GT itu sudah kembali di posnya masing-masing. “Tidak ada (yang meninggal lagi), sudah semua kan kemarin, sudah disampaikan Pak Kapuspen,” tandasnya.

● han

Usut Suap Ketok Palu, KPK Kembali Panggil Salah Satu Anggota DPRD Jambi Hasim Ayub

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024, Hasim Ayub alias Hasyim Ayub, Jumat (28/4).

Hasim Ayub diminta keterangannya sebagai saksi terkait kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Sebelum 31 May 2023

Selain Hasim Ayub, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi, Dody Irawan dan Direktur PT Athar Graha Persada, M Imaduddin alias Iim.

Para saksi tersebut diperiksa oleh tim penyidik KPK di Mapolda Jambi.

“Pemeriksaan dilakukan di Poldo Jambi, atas nama tersebut,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/4).

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 28 tersangka baru terkait kasus

suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Penetapan tersangka terhadap 28 mantan anggota DPRD Jambi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus suap mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Ke-28 tersangka baru anggota DPRD Jambi tersebut yakni Syopian (SP); Sofyan Ali (SA); Sainuddin (SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); Rudi Wijaya (RW); M Juber (MJ); Poprianto (PR); Ismet Kahar (IK); Tartiniyah RH (TR); Kusnandar (KN); Mely Hairiya (MH); Luhut Silaban (LS); Edmon (EM).

Kemudian, M Khairil (MK); Rahima (RH); Mesran (MS); Hasani Hamid (HH); Agus Rama (AR); Bustami (BA); Hasim Ayub (HA); Nurhayati (NR); Nasri Umar (NU); Abdul Salam Haji Daud (ASHD); Djamiluddin (DL); Muhammad Isoni (MI); Mauli (MU); dan Hasan Ibrahim (HI).

Dari 28 mantan anggota

DPRD yang telah ditetapkan tersangka tersebut, baru 10 orang yang dilakukan proses penahanan. Sebanyak 10 orang yang dilakukan penahanan tersebut yakni, Syopian (SP); Sofyan Ali (SA); Sainuddin (SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); Rudi Wijaya (RW); M Juber (MJ); Poprianto (PR); Ismet Kahar (IK); dan Tartiniyah RH (TR).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemprov Jambi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus salah oleh pengadilan. ● mei

KPK Sita Hotel, Apartemen, hingga Rumah Milik Lukas Enembe Senilai Rp60,3 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita sejumlah aset milik Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE). Sedikitnya ada tujuh aset senilai Rp60,3 miliar milik Lukas Enembe yang disita KPK. Aset-aset tersebut diduga dari hasil korupsi.

“Dari beberapa rangkaian pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dengan satu di antaranya kembali melakukan penyitaan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/4).

“Setidaknya tujuh aset bernilai ekonomis yang diduga milik ataupun terkait dengan tersangka LE. Adapun, nilai aset mencapai kisaran Rp60,3 miliar dalam berbagai bentuk,” kata Ali.

Aset yang disita tersebut berupa hotel, tanah, apartemen, hingga rumah mewah. Berikut rincian tujuh aset Lukas Enembe yang disita KPK:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa hotel yang berlokasi di Jalan S Condronogoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya;
2. Tanah seluas 2.000 m² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Doyo Baru, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Irian Jaya;
3. Tanah seluas 682 m² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, Provinsi Irian Jaya;
4. Tanah seluas 2.199 m² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa Doyo Baru, Kecamatan Waibu,

Kabupaten Jayapura; 5. 1 unit apartemen The Groove Masterpiece Jakarta Selatan yang berlokasi di Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

6. Rumah Cluster Violin 3, Golf Island, Jalan Pantai Indah Barat, PIK, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjarangan, Kota Jakarta Utara;

7. Tanah seluas 862 m² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Babakan Lebak, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

“Ditambah pula dengan penyitaan sejumlah uang dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” kata Ali menambahkan.

KPK menetapkan Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Saat ini, Rijatono Lakka sedang menjalani proses persidangan. Sementara itu, KPK kembali menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lukas Enembe. Lukas kemudian dijerat kembali sebagai tersangka pencucian uang. ● han



EVAKUASI JENAZAH KORBAN KECELAKAAN KAPAL SB EVELYN CALISTA 01 Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban kecelakaan kapal cepat SB Evelyn Calista 01 di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Jumat (28/4). Tim SAR gabungan mengevakuasi 11 jenazah korban kecelakaan kapal cepat SB Evelyn Calista 01 dan satu korban masih dalam pencarian.